

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL ATAU SUMBER LAIN

- Danial, E., & Wasriah, N. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: *Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Hadi, S. (1981). *Metodologi Penelitian Research*. Yogyakarta: *Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Revisi ke-5*. <https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. <https://covid19.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>
- Kementerian Keuangan RI. (2020, October 22). *Ini Pokok-Pokok Perubahan PMK 115/PMK.06/2020 Sebagai Penyederhanaan Optimalisasi BMN di Masa Pandemi Covid-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pokok-pokok-perubahan-pmk-115pmk062020-sebagai-penyederhanaan-optimalisasi-bmn-di-masa-pandemi-covid-19/>
- Muslim, Moh. (2021). *PHK PADA MASA PANDEMI COVID-19. ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3). <https://doi.org/10.55886/esensi.v23i3.218>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: *Ghalia Indonesia*.
- Perencanaan Pembangunan Nasional, K., & Republik Indonesia, B. (n.d.). *Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*. In *The Indonesian Journal of Development Planning: Vol. IV* (Issue 2). <https://covid19.go.id/peta-sebaran>,
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.
- Sugiyono Prof, D. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: *Cv. Alfa Beta*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 151/KN/2019 tentang Penetapan Integrasi Proses Bisnis Layanan Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 /PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.*

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara*